

# Kesiapan Guru dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di Sekolah Dasar di Kecamatan Bathin III

## *Teacher Readiness and Utilisation of the Independent Teaching Platform in Elementary Schools in Bathin III District*

**Efrianti, Retno Wahyu Ningsih & Titi Chandrawati**

Magister Pendidikan Dasar, Universitas Terbuka, Indonesia

Diterima: 12 Februari 2026; Direview: 12 April 2026; Disetujui: 19 April 2026

\*Corresponding author: [efriantibungo@gmail.com](mailto:efriantibungo@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Kurikulum Merdeka yang menuntut kesiapan guru secara pedagogik, profesional, dan digital, serta optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai instrumen pendukung kebijakan. Meskipun secara konseptual kurikulum ini memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada guru, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi kesiapan dan pemanfaatan platform digital, khususnya di wilayah non-perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan guru, proses implementasi Kurikulum Merdeka, dan pemanfaatan PMM di Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada enam sekolah dasar, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi untuk menjamin kredibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum telah berjalan secara struktural dan administratif, namun secara substantif masih berada pada tahap adaptasi berkembang. Pemanfaatan PMM berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi guru yang aktif mengaksesnya, tetapi belum merata karena keterbatasan literasi digital, waktu, dan dukungan struktural.

**Kata Kunci:** Kesiapan Guru, Kurikulum Merdeka, Platform Merdeka Mengajar.

### Abstract

*This research is motivated by the implementation of the Independent Curriculum, which requires pedagogic, professional, and digital readiness of teachers, as well as the optimisation of the use of the Independent Teaching Platform (PMM) as a policy support instrument. Although conceptually this curriculum provides flexibility and autonomy to teachers, the reality on the ground shows that there is a variation in the readiness and utilisation of digital platforms, especially in non-urban areas. This study aims to analyse teacher readiness, the implementation process of the Independent Curriculum, and the use of PMM in Bathin III District Elementary School, Bungo Regency. The research uses a qualitative descriptive approach with a phenomenological type. Data was obtained through observations, in-depth interviews, and documentation at six elementary schools, then analysed using Miles and Huberman's interactive model with triangulation techniques to ensure credibility. The results of the study show that the implementation of the curriculum has been carried out structurally and administratively, but substantively, it is still at the stage of adaptation and development. The use of PMM contributes positively to improving the competence of teachers who actively access it, but it is not even due to limited digital literacy, time, and structural support.*

**Keywords:** Teacher Resiliency, Independent Curriculum, Independent Teaching Platform

**How to Cite:** Efrianti, Ningsih, R.W. & Chandrawati, T. (2026) Kesiapan Guru dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di Sekolah Dasar di Kecamatan Bathin III. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (4): 1545-1553



## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Transformasi pendidikan menjadi agenda strategis berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam menjawab tantangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan perkembangan teknologi digital yang pesat (Schleicher, 2018). Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kurikulum sebagai instrumen utama yang mengarahkan proses pembelajaran di satuan pendidikan (Fullan, 1982; Priestley et al., 2015). Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai pedoman operasional yang menentukan arah, isi, dan strategi pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional (Huda, 2017).

Dalam konteks reformasi pendidikan nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mendorong diferensiasi pembelajaran, serta menekankan asesmen formatif dan penguatan Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2024). Secara konseptual, Kurikulum Merdeka mengedepankan otonomi guru, penyederhanaan administrasi, serta pembelajaran berbasis kompetensi (Baro'ah, 2020; Heryahya et al., 2022). Namun demikian, perubahan kurikulum pada hakikatnya tidak hanya menyangkut perubahan dokumen, tetapi juga perubahan paradigma, budaya sekolah, dan kesiapan sumber daya manusia.

Kesiapan guru menjadi faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum (Darling-Hammond et al., 2017; Ventayen et al., 2017). Guru dituntut untuk mampu memahami Capaian Pembelajaran (CP), menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), merancang modul ajar, serta melaksanakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif secara autentik. Selain itu, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran menjadi prasyarat penting dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka (Scherer et al., 2019; Voogt et al., 2013). Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana pelatihan mandiri, penyedia referensi ajar, serta ruang berbagi praktik baik antarguru.

Meskipun secara konseptual Kurikulum Merdeka dan PMM menawarkan inovasi signifikan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kesiapan guru. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam memahami struktur kurikulum, menyusun perangkat ajar, serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran (Ekawati et al., 2022; Purani & Putra, 2022). Keterbatasan literasi digital, minimnya pelatihan yang berkelanjutan, serta beban administratif menjadi hambatan yang sering dihadapi (König et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Heryahya et al. (2022) menunjukkan bahwa guru sekolah dasar di Kota Cirebon secara umum berada pada kategori siap dalam implementasi Kurikulum Merdeka, meskipun masih terdapat kendala dalam perumusan tujuan pembelajaran dan integrasi pembelajaran abad ke-21. Sementara itu, Purani dan Putra (2022) menemukan bahwa guru di SDN 2 Cempaga belum sepenuhnya siap karena keterbatasan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum dan perangkat pembelajaran. Penelitian lain oleh Arnes et al. (2023) mengungkapkan bahwa pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar belum optimal; meskipun sebagian besar guru telah mengunduh aplikasi, hanya sebagian yang aktif menyelesaikan pelatihan dan memanfaatkan fitur secara maksimal.

Ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kesiapan guru dan pemanfaatan PMM masih bervariasi antardaerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memfokuskan kajian pada satu variabel secara terpisah, baik pada kesiapan guru maupun pada pemanfaatan platform digital. Belum banyak penelitian yang secara simultan menganalisis keterkaitan antara kesiapan guru, implementasi Kurikulum Merdeka, dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dalam satu kerangka komprehensif, khususnya dalam konteks sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan observasi awal di beberapa sekolah dasar di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, ditemukan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka telah diterapkan pada seluruh jenjang kelas, guru masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian guru belum terbiasa menyusun ATP

dan modul ajar secara mandiri, mengalami kebingungan dalam pelaksanaan asesmen autentik, serta belum memanfaatkan PMM secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap antara desain kebijakan yang ideal dan praktik implementasi di tingkat sekolah dasar, terutama di wilayah non-perkotaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesiapan guru, proses implementasi Kurikulum Merdeka, serta pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan kurikulum berbasis otonomi dan integrasi teknologi digital dalam pendidikan dasar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan program pendampingan dan pelatihan yang lebih kontekstual, serta memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena kesiapan guru, implementasi Kurikulum Merdeka, serta pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman subjektif guru sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kurikulum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran numerik, melainkan pada eksplorasi makna, persepsi, serta pengalaman informan dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan.

Penelitian dilaksanakan di enam Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang dianggap paling memahami konteks penelitian, yaitu kepala sekolah, guru kelas, pengawas sekolah, serta perwakilan dari dinas pendidikan. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pembelajaran, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi perangkat ajar seperti modul ajar, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan dokumen pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh dari arsip sekolah dan kebijakan terkait implementasi Kurikulum Merdeka.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data (B.Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif tematik agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi temuan melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna menjamin kredibilitas data. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan guru, implementasi Kurikulum Merdeka, serta pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kurikulum Merdeka di enam Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III**

Implementasi Kurikulum Merdeka di enam sekolah dasar Kecamatan Bathin III telah dilaksanakan secara menyeluruh pada semua jenjang kelas. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi perangkat pembelajaran, secara administratif sekolah telah mengadopsi struktur Kurikulum Merdeka, termasuk penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta modul ajar. Namun demikian, tingkat internalisasi konsep dan kualitas pelaksanaan menunjukkan variasi yang cukup signifikan.

Pada tahap perencanaan pembelajaran, seluruh guru telah memiliki dokumen ATP dan modul ajar untuk setiap mata pelajaran. Dokumen yang dianalisis menunjukkan bahwa struktur

ATP telah mengikuti ketentuan resmi, dengan memuat tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP. Akan tetapi, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian guru masih mengadaptasi template ATP dari Platform Merdeka Mengajar (PMM) atau hasil diskusi Kelompok Kerja Guru (KKG), tanpa banyak modifikasi kontekstual. Salah satu guru menyatakan bahwa penggunaan template mempermudah penyusunan karena keterbatasan waktu dan kekhawatiran terhadap kesalahan format.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi pada tahap perencanaan masih bersifat adaptif-administratif. Biesta et al. (2015) menegaskan bahwa keberhasilan reformasi kurikulum sangat ditentukan oleh teacher agency, yaitu kapasitas guru untuk melakukan interpretasi dan adaptasi kurikulum sesuai konteks kelasnya. Ketika guru lebih banyak mereplikasi dokumen dibandingkan dengan mengembangkan secara kontekstual, otonomi kurikulum belum sepenuhnya teraktualisasi. Dengan demikian, meskipun secara struktural perangkat pembelajaran telah tersedia, secara substantif kreativitas dan fleksibilitas yang menjadi ruh Kurikulum Merdeka masih dalam tahap transisi.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, observasi menunjukkan bahwa sebagian guru telah berupaya menerapkan pendekatan pembelajaran aktif. Diskusi kelompok, tanya jawab interaktif, serta penggunaan media visual mulai terlihat dalam beberapa kelas. Siswa tampak lebih terlibat dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan praktik pada kurikulum sebelumnya. Guru memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan hasil diskusi sederhana.

Namun demikian, dominasi metode ceramah masih ditemukan, terutama ketika guru menghadapi keterbatasan waktu atau kesulitan mengelola kelas. Pada situasi tertentu, guru kembali menggunakan pendekatan satu arah untuk memastikan materi tersampaikan secara tuntas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pedagogik belum sepenuhnya stabil. Fullan (2007) menyatakan bahwa perubahan kurikulum sering kali lebih mudah terjadi pada tingkat dokumen dibandingkan dengan praktik pedagogi, karena perubahan praktik memerlukan pergeseran keyakinan, keterampilan, dan budaya profesional. Dalam konteks penelitian ini, guru telah memahami tuntutan pembelajaran berpusat pada peserta didik, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkannya.

Kurikulum Merdeka secara konseptual menekankan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa (Kemendikbudristek, 2024). Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa diferensiasi belum dilaksanakan secara sistematis. Guru umumnya menggunakan metode yang sama untuk seluruh siswa, tanpa modifikasi strategi berdasarkan variasi kemampuan belajar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman tentang diferensiasi masih bersifat konseptual dan belum operasional. Tondeur et al. (2017) menjelaskan bahwa perubahan praktik pembelajaran membutuhkan dukungan kompetensi pedagogik yang kuat serta pelatihan berkelanjutan agar guru mampu mengintegrasikan strategi inovatif secara efektif.

Pada aspek asesmen, guru telah melaksanakan penilaian formatif dan sumatif sesuai kerangka Kurikulum Merdeka. Berdasarkan wawancara, guru memahami pentingnya asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Namun, dalam praktiknya, asesmen diagnostik lebih banyak dilakukan secara informal melalui tanya jawab atau pengamatan awal, tanpa menggunakan instrumen terstruktur. Dokumentasi menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki bukti tertulis pelaksanaan asesmen diagnostik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma asesmen sebagai proses berkelanjutan belum sepenuhnya diinternalisasi. Darling-Hammond et al. (2017) menekankan bahwa asesmen formatif yang efektif memerlukan instrumen yang jelas, dokumentasi sistematis, serta umpan balik reflektif yang mendukung perkembangan belajar siswa. Ketika asesmen diagnostik tidak terdokumentasi secara formal, potensi untuk memanfaatkan hasilnya dalam perencanaan pembelajaran menjadi terbatas. Dengan demikian, implementasi asesmen dalam Kurikulum Merdeka di lokasi penelitian masih berada pada tahap awal adaptasi.

Penilaian formatif umumnya dilakukan melalui tugas harian, observasi sikap, dan lembar kerja siswa. Guru telah mencoba menggunakan rubrik penilaian, namun penggunaannya belum konsisten. Dalam beberapa kasus, rubrik hanya digunakan sebagai formalitas administrasi, sementara proses penilaian tetap berorientasi pada nilai akhir. Hal ini menunjukkan adanya

kecenderungan mempertahankan paradigma penilaian tradisional. OECD (2019) menyatakan bahwa reformasi asesmen sering menghadapi tantangan budaya sekolah yang telah lama terbiasa dengan evaluasi berbasis hasil, sehingga memerlukan waktu dan pendampingan untuk beralih ke asesmen berbasis proses dan kompetensi.

Implementasi Profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) juga telah dilaksanakan di beberapa sekolah. Kegiatan seperti gotong royong, literasi, dan proyek sederhana berbasis lingkungan dilakukan secara kolaboratif. Guru menyatakan bahwa siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan proyek karena memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari pembelajaran rutin di kelas. Namun demikian, integrasi P5 dengan pembelajaran intrakurikuler belum sepenuhnya terstruktur. Proyek cenderung dilaksanakan sebagai kegiatan terpisah, bukan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran tematik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap integrasi kurikulum masih berkembang. Menurut Schleicher (2018), pendidikan abad ke-21 menuntut integrasi kompetensi kognitif, sosial, dan karakter secara simultan dalam pembelajaran. Ketika proyek hanya diposisikan sebagai kegiatan tambahan, potensi penguatan karakter belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman konseptual agar P5 tidak hanya menjadi agenda kegiatan, tetapi juga menjadi pendekatan pedagogis yang terintegrasi.

Dari sisi dukungan kelembagaan, kepala sekolah telah memfasilitasi pertemuan rutin melalui KKG untuk membahas kendala implementasi Kurikulum Merdeka. Guru mengakui bahwa forum tersebut membantu dalam berbagi pengalaman dan solusi praktis. Akan tetapi, supervisi akademik belum dilakukan secara sistematis dan berbasis refleksi mendalam terhadap praktik pembelajaran. Kepemimpinan instruksional yang kuat sangat diperlukan dalam mendukung perubahan kurikulum. Hallinger (2011) menegaskan bahwa kepala sekolah berperan strategis dalam memastikan konsistensi implementasi kebijakan melalui supervisi, pendampingan, dan penguatan budaya profesional.

Kendala utama yang diidentifikasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka meliputi keterbatasan waktu dalam penyusunan perangkat ajar, kurangnya pemahaman mendalam terhadap ATP, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Guru mengungkapkan bahwa penyusunan modul ajar membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan RPP pada kurikulum sebelumnya. Selain itu, literasi digital yang belum merata juga memengaruhi kemampuan guru dalam mengakses sumber belajar dan mengembangkan media inovatif.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Scherer et al. (2019) yang menyatakan bahwa kesiapan digital guru menjadi faktor krusial dalam keberhasilan reformasi pendidikan berbasis teknologi. Tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan dan fasilitas memadai, implementasi kebijakan berisiko hanya bersifat administratif. Oleh karena itu, perubahan kurikulum perlu diiringi dengan penguatan kapasitas profesional guru secara sistemik.

Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III menunjukkan kemajuan pada aspek struktural dan administratif. Guru telah memiliki perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran aktif dalam beberapa kesempatan, serta mulai menerapkan asesmen formatif. Namun demikian, pada aspek pedagogis dan kultural masih terdapat dinamika transisi. Transformasi menuju pembelajaran yang sepenuhnya berpusat pada peserta didik, berbasis diferensiasi, dan menggunakan asesmen autentik secara konsisten masih memerlukan penguatan kompetensi dan pendampingan berkelanjutan.

Implementasi Kurikulum Merdeka di lokasi penelitian dapat dikategorikan berada pada tahap adaptasi berkembang (*developing stage*). Reformasi kurikulum telah diterima dan dijalankan, tetapi internalisasi nilai dan paradigma belum sepenuhnya matang. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kurikulum merupakan proses jangka panjang yang memerlukan dukungan profesional, kepemimpinan instruksional, serta komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

### **Penggunaan Platform Merdeka Belajar**

Platform Merdeka Mengajar (PMM) dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai sarana pendukung implementasi Kurikulum Merdeka,

dengan tujuan memperkuat kompetensi guru melalui pelatihan mandiri, penyediaan referensi ajar, serta wadah berbagi praktik baik. Berdasarkan hasil penelitian di enam Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III, pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar menunjukkan variasi tingkat penggunaan, intensitas, dan efektivitas.

Secara umum, seluruh guru yang menjadi informan telah memiliki akun belajar.id dan telah mengunduh aplikasi Platform Merdeka Mengajar, baik melalui gawai pribadi maupun melalui akses komputer sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi aksesibilitas awal, tidak terdapat hambatan signifikan dalam kepemilikan akun maupun instalasi aplikasi. Namun demikian, kepemilikan aplikasi tidak serta-merta berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan fitur yang tersedia. Beberapa guru mengakui bahwa aplikasi telah terpasang, tetapi jarang dibuka kecuali ketika ada kewajiban pelaporan atau arahan dari kepala sekolah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan PMM pada sebagian guru masih bersifat instrumental dan administratif, bukan sebagai kebutuhan profesional intrinsik. Menurut Scherer et al. (2019), dalam konteks integrasi teknologi pendidikan, faktor penerimaan dan motivasi internal guru memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan sekadar ketersediaan perangkat. Dengan demikian, keberadaan PMM sebagai platform digital belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai sumber belajar berkelanjutan, melainkan masih dipersepsikan sebagai bagian dari kewajiban kebijakan.

Pada aspek pelatihan mandiri, sebagian guru telah mengikuti beberapa topik pelatihan yang tersedia dalam PMM, khususnya terkait penyusunan modul ajar dan asesmen Kurikulum Merdeka. Guru yang aktif mengikuti pelatihan menyatakan bahwa materi yang tersedia membantu dalam memahami struktur CP, ATP, serta penyusunan asesmen formatif. Observasi terhadap praktik pembelajaran menunjukkan bahwa guru yang aktif menyelesaikan topik pelatihan cenderung lebih variatif dalam penggunaan metode pembelajaran dibandingkan dengan guru yang pasif.

Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas pemanfaatan PMM dengan peningkatan kompetensi pedagogik. Darling-Hammond et al. (2017) menegaskan bahwa pengembangan profesional yang efektif harus bersifat berkelanjutan, kontekstual, dan berbasis praktik nyata. PMM secara konseptual telah menyediakan kerangka tersebut melalui pelatihan mandiri dan video inspirasi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen dan konsistensi guru dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

Meskipun demikian, tidak semua guru menyelesaikan topik pelatihan hingga tuntas. Beberapa guru mengaku hanya membuka materi tertentu sesuai kebutuhan sesaat, tanpa mengikuti alur pembelajaran secara lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola belajar mandiri belum sepenuhnya terbangun sebagai budaya profesional. OECD (2019) menyatakan bahwa budaya pembelajaran sepanjang hayat pada guru merupakan prasyarat penting dalam reformasi pendidikan modern. Ketika pelatihan hanya diakses secara sporadis, maka dampaknya terhadap perubahan praktik pembelajaran menjadi terbatas.

Pada fitur referensi ajar, guru mengakui bahwa PMM membantu dalam menyediakan contoh modul ajar dan perangkat pembelajaran yang siap digunakan. Sebagian guru memanfaatkan fitur ini sebagai sumber inspirasi dalam menyusun perangkat ajar. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa modul yang diunduh digunakan tanpa modifikasi signifikan sesuai konteks kelas. Hal ini kembali menunjukkan kecenderungan adopsi administratif daripada adaptasi kontekstual.

Tondeur et al. (2017) menjelaskan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sumber digital, tetapi juga dengan kemampuan guru dalam melakukan adaptasi pedagogik sesuai kebutuhan siswa. Apabila referensi ajar hanya direplikasi tanpa refleksi kritis, maka fungsi PMM sebagai alat pemberdayaan profesional belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pemanfaatan fitur referensi perlu disertai kemampuan reflektif agar benar-benar mendukung diferensiasi pembelajaran.

Fitur aksi nyata dalam PMM yang memungkinkan guru mengunggah praktik baik juga telah dimanfaatkan oleh beberapa guru, meskipun dalam jumlah terbatas. Guru yang pernah mengunggah aksi nyata menyatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif. Namun, sebagian guru lainnya mengaku belum percaya diri untuk membagikan praktik pembelajaran karena merasa belum cukup inovatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya berbagi praktik baik belum sepenuhnya berkembang. Menurut Hargreaves dan O'Connor (2018), kolaborasi profesional yang efektif memerlukan rasa aman psikologis dan dukungan komunitas. Apabila guru belum merasa percaya diri atau belum mendapatkan umpan balik konstruktif, maka partisipasi dalam berbagi praktik cenderung rendah. Dengan demikian, penguatan komunitas belajar di tingkat sekolah dan kecamatan menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi fitur aksi nyata.

Dari sisi kendala teknis, beberapa guru menyampaikan bahwa keterbatasan jaringan internet menjadi hambatan dalam mengakses materi video secara lancar. Selain itu, keterbatasan waktu akibat beban administrasi dan tugas tambahan juga menjadi faktor penghambat pemanfaatan PMM secara konsisten. Guru menyatakan bahwa setelah menyelesaikan tugas mengajar dan administrasi, waktu untuk mengakses pelatihan mandiri menjadi terbatas.

Kendala ini sejalan dengan temuan König et al. (2020) yang menyatakan bahwa kesiapan digital guru tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh dukungan struktural seperti waktu, fasilitas, dan kebijakan manajemen sekolah. Tanpa alokasi waktu khusus untuk pengembangan profesional, platform digital cenderung dimanfaatkan secara minimal.

Selain kendala teknis dan waktu, literasi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi pemanfaatan PMM. Guru yang memiliki pengalaman lebih baik dalam penggunaan teknologi terlihat lebih aktif mengeksplorasi fitur-fitur PMM. Sebaliknya, guru yang kurang terbiasa dengan aplikasi digital cenderung menggunakan PMM hanya pada fitur dasar. Ventayen (2018) menyatakan bahwa kesiapan guru dalam pembelajaran daring meliputi keterampilan teknis, pengalaman digital, sikap terhadap teknologi, serta komitmen waktu. Dalam konteks penelitian ini, keempat dimensi tersebut memengaruhi variasi tingkat pemanfaatan PMM di lapangan.

Kendala ini sejalan dengan temuan König et al. (2020) yang menyatakan bahwa kesiapan digital guru tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh dukungan struktural seperti waktu, fasilitas, dan kebijakan manajemen sekolah. Tanpa alokasi waktu khusus untuk pengembangan profesional, platform digital cenderung dimanfaatkan secara minimal.

Selain kendala teknis dan waktu, literasi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi pemanfaatan PMM. Guru yang memiliki pengalaman lebih baik dalam penggunaan teknologi terlihat lebih aktif mengeksplorasi fitur-fitur PMM. Sebaliknya, guru yang kurang terbiasa dengan aplikasi digital cenderung menggunakan PMM hanya pada fitur dasar. Ventayen (2018) menyatakan bahwa kesiapan guru dalam pembelajaran daring meliputi keterampilan teknis, pengalaman digital, sikap terhadap teknologi, serta komitmen waktu. Dalam konteks penelitian ini, keempat dimensi tersebut memengaruhi variasi tingkat pemanfaatan PMM di lapangan.

Dari perspektif dampak terhadap pembelajaran, guru yang aktif menggunakan PMM menunjukkan peningkatan variasi strategi pembelajaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap asesmen berbasis kompetensi. Namun demikian, dampak tersebut belum merata di seluruh sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa PMM memiliki potensi signifikan sebagai instrumen penguatan implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan individu dan dukungan kelembagaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan platform digital dalam mendukung reformasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desain aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukungnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan berupa pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta kebijakan manajemen sekolah yang memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kompetensinya melalui pemanfaatan PMM secara optimal.

## **SIMPULAN**

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III telah berjalan secara struktural dan administratif, ditandai dengan tersusunnya perangkat pembelajaran seperti CP, ATP, dan modul ajar serta pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Guru juga telah mulai menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif dan melaksanakan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun demikian, secara substantif implementasi masih berada pada tahap adaptasi berkembang, karena kreativitas kontekstual dalam penyusunan perangkat ajar,

konsistensi pembelajaran berdiferensiasi, serta penerapan asesmen autentik belum sepenuhnya stabil. Transformasi pedagogik menuju pembelajaran yang sepenuhnya berpusat pada peserta didik masih memerlukan penguatan kompetensi, refleksi profesional, dan pendampingan berkelanjutan agar prinsip otonomi dan fleksibilitas dalam Kurikulum Merdeka dapat terwujud secara optimal.

Penggunaan Platform Merdeka Mengajar di Sekolah Dasar Kecamatan Bathin III menunjukkan bahwa akses terhadap platform telah tersedia dan sebagian guru telah memanfaatkannya untuk pelatihan mandiri, referensi ajar, serta penyusunan perangkat pembelajaran. Pemanfaatan PMM berkontribusi positif terhadap peningkatan variasi metode pembelajaran dan pemahaman asesmen berbasis kompetensi pada guru yang aktif mengaksesnya. Namun demikian, intensitas penggunaan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjadi budaya belajar profesional yang berkelanjutan. Hambatan berupa literasi digital yang belum merata, keterbatasan waktu, serta dukungan struktural yang terbatas menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi platform. Dengan demikian, PMM memiliki potensi strategis dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan individu guru dan dukungan kelembagaan yang sistematis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnes, A., Musparidi, M., & Yusmanila, Y. (2023). Analisis Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Oleh Guru PPKn untuk Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(1), 60–70. <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V5I1.4647>
- Baro'ah, S. (2020). *KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN*.
- Biesta, G., Priestley, M., & Robinson, S. (2015). The role of beliefs in teacher agency. *Teachers and Teaching*, 21(6), 624–640. <https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044325>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña* - Google Books. In *Sage Publications*.
- Ventayen, C. C. O., Joy, R., & Ventayen, M. (2017). ROLE OF SOCIAL MEDIA IN EDUCATION: A TEACHERS' PERSPECTIVE. In *ASEAN Journal of Open Distance Learning* ↵ (Vol. 9, Number 2). <https://www.internetsociety.org/news/in-the-news/>
- Darling-Hammond, L., Hyster, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective Teacher Professional Development*.
- Ekawati, R., Susanti, D., Muhammadiyah Sumatera Barat, U., Jambak No, J., & Koto Tangah, K. (2022). Analisis Persiapan Guru Dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Kurikulum Merdeka Di SD IV Muhammadiyah Kota Padang. *Jurnal Media Ilmu*, 1(1), 33–39. <https://doi.org/10.31869/MI.V1I1.3936>
- Fullan, M. (1982). *The New Meaning of Educational Change - Michael Fullan*. Michaelfullan.Ca. <https://michaelfullan.ca/books/new-meaning-educational-change/>
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125–142. <https://doi.org/10.1108/09578231111116699>
- Heryahya, A., Herawati, E. S. B., Susandi, A. D., & Zulaiha, F. (2022). Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(2), 548–562. <https://doi.org/10.31539/JOEAI.V5I2.4826>
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52–75.
- Kemendikbudristek. (2024). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*.
- König, J., Jäger-Biela, D. J., & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 608–622. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650>
- OECD. (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. *Education at a Glance, Education at a Glance, 2019*. <https://doi.org/10.1787/F8D7880D-EN>
- Priestley, M., Edwards, R., Miller, K., & Priestley, A. (2015). *TEACHER AGENCY IN CURRICULUM MAKING: AGENTS OF CHANGE AND SPACES FOR MANOEUVRE*.
- Purani, N. K. C., & Putra, I. K. D. A. S. (2022). ANALISIS KESIAPAN GURU DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI SDN 2 CEMPAGA. *Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka*, 4(2), 8–12. <https://doi.org/10.59789/RAREPUSTAKA.V4I2.125>
- Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education. *Computers and Education*, 128, 13–35. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2018.09.009>

- Schleicher, A. (2018). World Class: How to Build a 21st-Century School System. *Strong Performers and Successful Reformers in Education, Strong Performers and Successful Reformers in Education, 2018*. <https://doi.org/10.1787/9789264300002-EN>
- Tondeur, J., Scherer, R., Siddiq, F., & Baran, E. (2017). A comprehensive investigation of TPACK within pre-service teachers' ICT profiles: Mind the gap! *Australasian Journal of Educational Technology, 33*(3), 46–60. <https://doi.org/10.14742/AJET.3504>
- Voogt, J., Fisser, P., Roblin, N. P., Tondeur, J., & van Braak, J. (2013). Technological Pedagogical Content Knowledge – a Review of the Literature. *Journal of Computer Assisted Learning, 29*(2), 109–121. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x>